



MANAJEMEN STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN BEKASI

Shufi Soenarto Putri ^{a1}, Hanny Purnamsari ^{b2}, Ani Nurdiani Azizah ^{c3}

^a Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

^b Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

^c Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

¹1710631180134@student.unsika.ac.id, ²hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id, ³ani.nurdiani@fisip.unsika.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 13-07-2021

Disetujui: 26-08-2021

Dipublikasikan: 29-09-2021

Kata Kunci:

1. Penanggulangan Banjir
2. Manajemen Strategi
3. BPBD

Keywords:

1. Flood Prevention
2. Strategic Management
3. BPBD

ABSTRAK

Abstrak: Banjir menjadi permasalahan sosial yang sering kali terjadi hampir setiap tahunnya. Kabupaten Bekasi dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi langganan banjir dengan jumlah wilayah yang terendam semakin meningkat setiap tahun dan menyebabkan kerugian di berbagai segi kehidupan. Hal ini cukup menjadi keresahan serta menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan banjir sehingga perlunya mengetahui manajemen strategi yang dilakukan oleh BPBD yang sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam mengatasi banjir berikut pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan menggunakan teori manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2008) yang terdapat empat tahapan : analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi yang dilakukan BPBD dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi belum optimal. Hal tersebut disebabkan masih adanya kekurangan dan kendala baik dari BPBD itu sendiri maupun dari masyarakatnya, kurangnya sumber daya yang dimiliki serta tidak adanya legalitas yang kuat mengenai kajian resiko bencana dan edukasi yang kurang kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah di aliran sungai sehingga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang dijadikan strategi oleh BPBD.

Abstract: Floods are a social problem that often occurs almost every year. Bekasi Regency in recent years has become a regular flood with the number of submerged areas increasing every year and causing losses in various aspects of life. This is quite a concern and raises questions from the public about how the government's role in flood prevention is, so it is necessary to know the strategic management carried out by the BPBD which is the hand of the Bekasi Regency Government in dealing with floods and their prevention and mitigation. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation using strategic management theory according to Wheelen and Hunger (2008) which have four stages: environmental analysis, strategy formulation, strategy implementation, evaluation and control. The results of this study indicate that the strategic management carried out by BPBD in flood prevention in Bekasi Regency has not been optimal. This is because there are still shortcomings and weaknesses both from BPBD itself and from the community, lack of resources and the absence of strong legality regarding disaster risk studies and education that lacks bad habits of people who still throw garbage in rivers so that it can affect the implementation of the program that is used as a strategy by BPBD.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang termaksud negara rawan bencana karena letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor (Bnpb.go.id, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam seperti ulah manusia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda bahkan kehilangan korban jiwa. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia hampir setiap tahun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) banjir adalah berair banyak yang deras serta terkadang meluap, atau kejadian tenggelamnya daratan karena kenaikan volume air secara mendadak. Banjir biasanya terjadi karena adanya kenaikan debit air pada badan air seperti danau dan sungai sehingga terjadi jebolnya tanggul atau bendungan dan air keluar dari jangkauan. Banjir menimbulkan dampak yang cukup merugikan baik bagi masyarakat, pemerintah maupun lingkungan sehingga banjir menjadi persoalan yang harus diperhatikan atau ditangani dengan dilakukannya pencegahan atau pengendalian banjir di Indonesia.

Kabupaten Bekasi merupakan daerah semi perkotaan yang sering mengalami banjir, wilayah Kabupaten Bekasi memiliki luas 1,484,37 km yang terdiri dari daratan dan pantai dengan jumlah penduduk sekitar 2,8 juta jiwa yang tersebar pada 23 (Dua Puluh Tiga) kecamatan, 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) desa/kelurahan dan memiliki luas kawasan hutan mangrove sebesar 700 Ha dan memiliki 12 (Dua Belas) daerah aliran sungai (DAS) besar maupun kecil, wilayah Kabupaten Bekasi juga memiliki 3300 perusahaan dengan skala besar baik penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan menyerap 1 juta-an lapangan pekerjaan.

Menurut indeks rawan bencana yang dirilis oleh BNPB bahwa Kabupaten Bekasi termaksud daerah rawan bencana dengan memiliki beberapa potensi bahaya bencana, hal tersebut berdasarkan sumber dari (bpbd.bekasikab.go.id, 2021), bahwa :

“Secara geografis, hidrologis dan geologis serta klimatologi ternyata menurut Indeks Rawan Bencana yang dirilis oleh BNPB bahwa Kabupaten Bekasi menduduki posisi 81 dari 400an Kabupaten/Kota di Indonesia. Adapun potensi bahaya bencananya adalah banjir, puting beliung, kekeringan, longsor, kebakaran, kegagalan teknologi/ transportasi, wabah/ epidemi penyakit”.

Penyebab Banjir di Kabupaten Bekasi beberapa tahun ini karena intensitas curah hujan yang tinggi sehingga meluapnya beberapa sungai diantaranya, sungai cijambe, kali sadang, kali cibeet, kali cilemahabang dan sungai citarum. Berdasarkan segi hidrologi pengaturan dan pengendalian tata air wilayah sangat diperlukan bagi Kabupaten Bekasi aliran-aliran sungai besar di daerah Kabupaten Bekasi beserta anak-anak sungai membangun bentuk Daerah Aliran Sungai (DAS). Pentingnya suatu DAS digunakan sebagai unit perencanaan penanggulangan banjir yang utuh merupakan konsekuensi logis untuk

menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber hutan, tanah, dan air (Nasyiruddin dkk, 2016). Di Kabupaten Bekasi terdapat 16 aliran sungai besar yaitu Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Ciherang, Sungai Belencong, Sungai Jambe, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cilemahabang, Sungai Cibeet, Sungai Cipamingkis, Sungai Siluman, Sungai Serengseng, sungai tersebut berkisar antara 3 sampai 80 meter (Sippa.ciptakarya.pu.go.id, diakses pada tanggal 13/03/2021)

Selain karena curah hujan yang tinggi dan membuat genangan air ataupun meluapnya sungai dan jebolnya beberapa tanggul, banjir di sebabkan juga karena dampak dari pembangunan dimana Kabupaten Bekasi merupakan kawasan atau wilayah industri yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan terhadap pembangunan. Seperti yang dikutip dari media *online* (*depok.pikiranrakyat*, 2021), menyatakan bahwa :

“Selain hujan dengan intensitas yang tinggi, meluapnya daerah aliran sungai serta sebagian ada juga yang diakibatkan drainase yang buruk sehingga air tidak mengalir dan tidak menampung debit air, penyebab banjir juga karena efek pembangunan menjadi alasan lain terjadinya bencana banjir”.

Selama beberapa tahun terakhir bencana banjir selalu melanda Kabupaten Bekasi, berdasarkan data banjir di Kabupaten Bekasi selama tiga tahun ini terhitung semakin banyak wilayah-wilayah yang terendam banjir, pada tahun 2019 banjir di Kabupaten Bekasi hanya merendam 9 (Sembilan) kecamatan dengan 11 (Sebelas) Desa sedangkan pada tahun 2020 banjir merendam semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi yaitu 23 (Dua Puluh Tiga Kecamatan) dengan 81 (Delapan Puluh Satu) Desa dan pada tahun 2021 per-Februari sudah merendam lebih dari setengah jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi yaitu mencapai 17 (Tujuh Belas) kecamatan dan 50 (Lima Puluh) Desa. Adapun wilayah yang terendam banjir berdasarkan data 2019-Februari 2021 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1
Wilayah Yang Terendam Banjir Di Kabupaten Bekasi Tahun 2019- 2021

No	Tahun	Wilayah Terendam	Tinggi Muka Air (TMA)
1	2019	9 Kecamatan 11 Desa	40-100 cm
2	2020	23 Kecamatan 81 Desa	50-130 cm
3	2021 Per-Februari	17 Kecamatan 50 Desa	50-150 cm

Sumber : BPBD Kabupaten Bekasi, 2021

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa wilayah yang terendam banjir di Kabupaten Bekasi pada tahun 2019-2021 Per-Februari mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2020 banjir melanda semua Kecamatan di Kabupaten Bekasi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 9 (Sembilan) kecamatan serta pada tahun 2021 per-Februari hampir mencapai seluruh kecamatan dan belum total keseluruhan sampai 2021 akhir nanti, dengan ketinggian yang cukup tinggi karena setiap kecamatan yang terendam dengan rata-rata Tinggi Muka Air (TMA) 50-150cm merendam rumah-rumah penduduk bahkan daerah yang jauh dari aliran sungai yang biasanya tidak pernah banjir pun terendam banjir. Begitupun dengan kerugian-kerugian yang terjadi pada masyarakat setiap tahunnya karena banjir, selain kerugian harta benda banjir di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 yang cukup tinggi dan merendam banyak wilayah juga

mengakibatkan kerugian beserta infrastruktur yang rusak. Adapun kerugian pada segi infrastruktur di Kabupaten Bekasi sebagaimana pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Data Kerugian Infrastruktur Akibat Banjir Tahun 2019-Februari 2021

Tahun	Infrastruktur	Luas/Jumlah
2019	Tanggul Jebol	810 m
	Jalan Rusak	9,5 km
	Rumah Terendam	5.931 Unit
	Sekolah Terendam	85 Unit
	Sawah	2.939 Hektar
	Tambak	2.341 Hektar
2020	Tanggul Jebol	3,5 Km
	Jalan Rusak	25,30 km
	Rumah Terendam	18.621 Unit
	Sekolah Terendam	284 Unit
	Sawah	5.569.856 Hektar
	Tambak	5.283.495 Hektar
2021	Tanggul Jebol	2 km
	Jalan Rusak	20,37 Km
	Rumah Terendam	15.485 Unit
	Sekolah Terendam	178 Unit
	Sawah	4.443.315 Hektar
	Tambak	4.328.178 Hektar

Sumber : BPBD Kabupaten Bekasi, 2021

Menanggapi hal tersebut atas kerugian-kerugian yang terjadi dan begitu kompleksnya permasalahan banjir, bahwa tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat begitupun dengan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap daerah, termasuk permasalahan bencana banjir di Kabupaten Bekasi menjadi tugas pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk menanggulangi atau mengendalikan banjir, maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi diperlukan suatu badan atau lembaga yang bertugas untuk menanggulangi bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. tujuan dibentuknya BPBD Kabupaten Bekasi adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. dengan dibentuknya BPBD diharapkan dapat melaksanakan suatu manajemen strategi dalam penanggulangan bencana banjir sehingga dapat mencegah terjadinya bencana dan dapat mengurangi kerugian terkhusus terjadinya korban jiwa.

Manajemen strategi dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi banjir dimulai dari proses analisis pengamatan lingkungan serta perumusan strategi dalam pencegahan yang dilakukan dan pelaksanaan serta evaluasi strategi. Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana

strategis (Renstra) yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan (taufiqurokhman, 2016)

Penanggulangan dan pencegahan banjir yang dilakukan oleh pemerintah khususnya BPBD belum optimal, banjir terulang setiap tahunnya bahkan semakin banyak merendam wilayah di Kabupaten Bekasi. Maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Bekasi” yang bertujuan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana tahapan manajemen strategi yang dilakukan oleh BPBD dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Bekasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer, pada primer pada penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan dimana diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara langsung dari objek penelitian ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, dan data sekunder pada penelitian ini penulis dapatkan hasil dari studi pustaka berupa dokumen-dokumen yang berasal dari media *online*, artikel ilmiah, *website*, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir. Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan peneliti mengenai Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi, data dan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi dengan beberapa informan penelitian dan dalam pisau analisis penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2008) yang mengemukakan bahwa ada empat tahapan dalam manajemen strategi yaitu analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi serta evaluasi strategi.

Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan merupakan sebuah langkah awal dalam proses manajemen strategi guna mempelajari karakteristik lingkungan itu sendiri, Dalam pengamatan lingkungan dilakukan suatu analisis

SWOT, yaitu *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) berdasarkan lingkungan internal dari suatu instansi tersebut, sedangkan *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) dalam lingkungan yang dihadapi suatu instansi. Peneliti melakukan wawancara mengenai tahapan ini kepada informan-informan yang memiliki keterlibatan dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi.

Dilihat dari *Strengths* atau keunggulan BPBD sudah mempunyai kantor atau bangunan sendiri karena hal tersebut memang menjadi hal utama terkait proses pekerjaan BPBD itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari wawancara pihak BPBD yaitu dengan adanya gedung dan halaman yang luas dapat mempermudah proses kegiatan seperti apel siaga, pelatihan-pelatihan untuk relawan ataupun pegawai BPBD bisa dilakukan di halaman kantor dan menyimpan logistik untuk evakuasi, dan juga bagi BPBD suatu keunggulan juga dengan memiliki SDM tenaga non-ASN yang membantu proses pekerjaan ataupun kegiatan diluar mengingat BPBD sendiri memiliki 3 fase kerja yaitu pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Rabu 16 Juni 2021 Kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bekasi, yang menyatakan :

“Jika dilihat dari strength nya atau kelebihan, kekuatan kita itu yang pertama bahwa BPBD sudah punya gedung sendiri karena sejak 2011 ditetapkan kita tidak punya gedung sendiri dan baru tahun 2016 kita sudah punya gedung sendiri hal ini menunjang segala kegiatan BPBD dengan baik kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan di halaman kantor dan cukup menampung logistik serta alat-alat penanggulangan lainnya. lalu yang kedua adalah dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi, kondisi sarana prasarana di BPBD sejauh ini dirasa masih cukup memadai untuk menunjang kinerja, itu sarana proses pengadministrasian ya beda lagi dengan sarana prasarana dalam evakuasi penanggulangan banjir dan yang ketiga dari sdm nya dibantu oleh tenaga non-ASN”.

Dilihat dari *weakness* atau yang menjadi kendala BPBD saat menanggulangi banjir adalah sumber daya belum maksimalnya sumber daya baik secara kualitas dan kuantitas, walaupun BPBD sudah didukung oleh tenaga non-ASN dan mempunyai logistik sarana prasarana sesuai standar tetapi jika tahap tanggap darurat dengan kejadian banjir yang *massive* hampir semua kecamatan secara kuantitas memang tetap akan kekurangan, secara kualitas pun sama tim di BPBD masih banyak yang belum terlatih, kedua BPBD Kabupaten Bekasi belum memiliki sistem aplikasi mengenai informasi bencana yang mana berpengaruh terhadap proses kesiapsiagaan masyarakat menghadapi banjir.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Rabu 16 Juni 2021 Kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bekasi, yang menyatakan :

“Yang menjadi kelemahan kita sampai saat ini yaitu sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas belum memadai untuk satu dinas dengan wilayah yang cukup luas dengan kejadian banjir yang begitu massive jadi kita personilnya kurang saat tanggap darurat, secara kualitas pun belum jadi tenaga-tenaga di BPBD itu belum dilatih sesuai dengan tugas pokok dalam penanggulangan bencana jadi belum banyak ya yang terlatih kan kita dilatih terlebih dahulu supaya kita tidak menjadi korban juga kan”

Untuk memperoleh informasi yang lebih dalam, peneliti pun juga mewawancarai masyarakat di Kelurahan Jatimulya, mengenai kekurangan BPBD dalam penanggulangan banjir, beliau pun mengatakan :

“Selain sumber daya yang dimiliki BPBD masih belum maksimal baik itu SDM ataupun sarana prasarana penunjang proses evakuasi seperti perahu karet, menurut saya juga BPBD belum memaksimalkan memanfaatkan teknologi sebagai edukasi sosialisasi kepada masyarakat seperti misalnya aplikasi yang memberikan informasi kebencanaan seperti titik banjir, ketinggian air serta edukasi tentang persiapan menghadapi bencana jadi jika hujan deras di malam hari masyarakat pun bisa lebih waspada tidak tertidur memantau hanya dengan aplikasi dan mempersiapkan melindungi barang-barang berharga”.

Dilihat dari *opportunity* atau dukungan yang didapatkan, BPBD Kabupaten Bekasi selain dengan regulasi yang jelas juga mendapatkan dukungan dari *stakeholder*, yaitu SKPD atau dinas-dinas terkait dalam proses pengevakasian dan juga pihak swasta yang membantu dalam logistik atau memberi bantuan sembako, serta adanya lembaga atau organisasi masyarakat yang memang fokus terhadap lingkungan atau bencana dan relawan-relawan di Kabupaten Bekasi yang membantu dalam proses pengevakasian.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Rabu 16 Juni 2021 Kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi, yang menyatakan :

“Jika peluang dan dukungan dari faktor eksternal yaitu secara regulasi jelas di dukung oleh UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga kita menjalankan tugas berpedoman dengan itu, lalu adanya program CSR dunia usaha atau swasta sejauh ini beberapa ikut andil memberikan bantuan saat terjadinya bencana, selain itu memang pada saat tanggap darurat terjadinya bencana pun koordinasi dengan SKPD lain atau pun lembaga non pemerintah yang cukup mendukung dalam proses pengevakasian”.

Dilihat dari *threats* dan menjadi tantangan BPBD dalam menanggulangi banjir yaitu belum adanya legalitas yang kuat yaitu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai kajian resiko bencana, hal ini menjadi penghambat BPBD untuk menjalankan tugasnya. Mengingat dalam penanggulangan banjir ini memang diperlukannya semua unsur yang menangani sesuai tupoksinya masing-masing, dengan tidak adanya legalitas secara perda atau perbup menimbulkan rasa kurangnya tanggung jawab kepedulian perangkat daerah lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Rabu 16 Juni 2021 Kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi, yang menyatakan :

“Sejauh ini yang menurut kami penting masih menjadi kendala belum optimalnya penanggulangan bencana banjir karena secara regulasi belum adanya legalitas yang kuat seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai kajian resiko bencana yang mengintegrasikan beberapa perangkat daerah lainnya, sejauh ini hanya SK Bupati saja, memang jadinya agak sulit terkait koordinasi dengan perangkat daerah lainnya seperti dinas lingkungan hidup, dinas PUPR yang ikut bertanggung jawab, mereka juga ada program prioritasnya masing-masing, maka jika kajian resiko bencana dilegalitaskan menjadi perda atau perbup itu wajib dilaksanakan dan menjadi prioritas, jadi tidak maksimalnya selama ini seperti normalisasi sungai secara menyeluruh, pembuatan turap, itu tugas dari perangkat daerah lainnya dan hal tersebut termaksud merupakan pencegahan dalam penanggulangan banjir”.

Perumusan Strategi

Perumusan strategi yang meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Dalam merumuskan rencana strategi atau (renstra) harus beracuan atau berpedoman dengan visi misi dan tujuan organisasi tersebut, begitupun dengan BPBD Kabupaten Bekasi dalam merumuskan dan menentukan strategi untuk penanggulangan banjir harus sesuai dengan visi misi dan tujuan BPBD Kabupaten Bekasi.

Visi misi BPBD Kabupaten Bekasi mengacu pada visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, adapun visinya yaitu :

*“Terwujudnya Kabupaten Bekasi **Bersinar**”*

Berdaya Saing, Sejahtera, Indah dan Ramah Lingkungan.

Misi BPBD sesuai dengan misi Kabupaten Bekasi pada poin ke-lima yaitu : ***“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak”***.

Adapun tujuan BPBD Kabupaten Bekasi yaitu meningkatkan kewaspadaan bencana alam dan non alam dengan indikator sasaran menurunnya indeks resiko bencana (IRB) karena Kabupaten Bekasi sangat beresiko bencana banjir yang cukup tinggi, yaitu ke-4 dari 381 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya alur visi misi Kabupaten Bekasi dan BPBD dalam perumusan strategi, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar. 1
Alur Visi Misi Tujuan Perumusan Renstra BPBD



Sumber : Renstra BPBD Kabupaten Bekasi 2017-2022

Strategi BPBD dalam penanggulangan bencana termaksud bencana banjir yaitu mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, strategi tersebut dikembangkan kedalam tahap pencegahan dan mitigasi yaitu dengan program Desa/Kelurahan tangguh bencana yang tujuan khususnya melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.

Untuk melihat lebih jelas mengenai tujuan, sasaran, strategi dan program BPBD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar. 2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Program

Tujuan	➤	Meningkatnya kewaspadaan bencana alam dan non alam
Sasaran	➤	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana
Indikator Sasaran	➤	Menurunnya Indeks Resiko Bencana
Strategi	➤	Mengurangi Resiko Bencana dan Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
Program	➤	Pencegahan dan Mitigas Bencana : Program Kelurahan/Desa Tangguh Bencana

Sumber : Renstra BPBD Kabupaten Bekasi 2017-2022

Program desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana menjadi strategi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Program destana/katana berlandaskan dasar hukum UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana. Dalam pembentukan destana ini memiliki 3 kriteria, yaitu destana tingkat pertama, madya dan utama penentuan tingkatan tersebut berdasarkan hasil dari jawaban kusioner 60 pertanyaan yang diberikan BPBD dengan pegawai kelurahan/desa, mekanisme pembentukan destana/katana ini tidak ditentukan oleh BPBD akan tetapi pihak desa/kelurahan yang mengajukan dengan sudah memenuhi indikator destana tersebut.

Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan sebagai tahapan aksi dari manajemen strategi, setelah sebelumnya telah dirumuskan perencanaan program yang dijadikan strategi. Pada tahapan inilah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program,

anggaran, dan prosedur. Begitupun dengan penanggulangan banjir, dari penyusunan strategi atau rencana strategi bahwa program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan strategi yang dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana termasuk bencana banjir. Dalam pelaksanaan strategi program desa/kelurahan tangguh bencana ini mengacu pada beberapa hal diantaranya yaitu 1) pengembangan program dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, 2) Anggaran, bagaimana BPBD mengalokasikan anggaran dalam program ini, 3) Prosedur, dengan menggambarkan secara rinci bagaimana tugas dalam program destana/katana ini.

Terdapat 3 tahapan dalam penanggulangan bencana yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kegiatan pengembangan program destana/katana ini juga berkegiatan dalam tiga tahapan penanggulangan bencana tersebut pada tahap pra bencana dengan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan, BPBD dan destana sesuai dengan tupoksinya berperan bersifat yang mengedukasi, sosialisasi kepada kelompok-kelompok relawan, masyarakat yang rentan bencana banjir sehingga tidak ada bentuk mitigasi secara pembangunan fisik, BPBD tetap berkordinasi dengan lembaga terkait dengan rapat kajian resiko bencana tersebut, untuk program destana sendiri personilnya dengan diberikan pelatihan-pelatihan dan keilmuan yang mendukung proses pengevakuasian.

Kemudian saat tanggap darurat atau terjadinya bencana banjir BPBD Kabupaten Bekasi telah menyiapkan tim reaksi cepat atau (TRC) sebagai tim yang merespon dengan segera dan mengevakuasi langsung ke tempat terjadinya bencana, selain itu BPBD mengarahkan fungsi komando kepada instansi lintas *sectoral* seperti POLRI dan TNI dan kesiapan peralatan juga diperlukan untuk melakukan evakuasi serta logistik yang dibutuhkan. Pada tahapan pasca bencana dengan melakukan rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengassesment bencana terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi dasar setiap tempat terjadinya bencana banjir, lalu dilakukanlah perhitungan dari hasil assesment tersebut dengan menghitung kerugian, dampak kerugian di berbagai aspek, sehingga BPBD Kabupaten Bekasi dapat memberikan suatu rekomendasi kepada perangkat daerah lain untuk bersama-sama menangani dan mengembalikan fungsi yang rusak serta kerugian akibat banjir kembali seperti semula

Untuk memperoleh informasi yang lebih dalam, peneliti mewawancari informan selaku Ketua Kelurahan Tangguh Bencana pada Kelurahan Jatimulya mengenai apa saja kegiatan program kelurahan tangguh bencana tersebut, beliau mengatakan :

“Kegiatan kita pada tahap pra bencana itu mengikuti pelatihan-pelatihan yang di sediakan oleh BPBD, pelatihan water rescue, pelatihan dayung, operator mesin perahu tempel, disaat sudah memasuki bulan september atau oktober kita mapping wilayah titik mana yang beresiko banjir serta penghambatnya karena apa lalu kita laporkan ke BPBD, kalau untuk mitigasi pencegahannya kita membantu perangkat kelurahan bergotong royong sama RT/RW untuk pengerukan sampah di sungai cijambe, kerja bakti selokan air dan semacamnya, tanggap darurat kita evakuasi warga, membuat dapur umum kordinasi sama relawan lain, pasca bencana kita membantu damkar untuk bersih-bersih lumpur karena luar biasa sekali dampak banjir ini untuk pemulihannya, dan ternyata pasca banjir juga banyak ular masuk di rumah-rumah warga kita menangani itu juga dengan bantuan relawan lain sebelumnya kita sudah latihan snake handling. Pelatihan Jitupasna juga iya dan kita ikut tim BPBD bidang rehabilitasi rekonstruksi membantu mereka mengumpulkan data-data kerugian yang diperlukan untuk menghitung kerugian tersebut

Anggaran yang belum maksimal menjadi kendala BPBD dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan informasi dari narasumber bahwa anggaran yang belum memadai berpengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM baik itu BPBD atau personil destana itu sendiri karena memang belum ada latihan yang secara rutin dan masih banyak yang belum terlatih, anggaran juga berpengaruh terhadap logistik yang dimiliki BPBD seperti alat-alat pengevakasian memang masih belum maksimal setengah dari jumlah total desa di Kabupaten Bekasi pun tidak ada, tetapi dengan peluang yang dimiliki bantuan dari relawan atau lembaga lain mempermudah BPBD dalam proses pengevakasian. Selain itu yang menjadi kendala adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak membuang sampah di sungai atau kali.

Destana/Katana dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No 1/2012 memang tidak adanya anggaran khusus yang diberikan untuk pengembangan program tersebut, anggaran yang dialokasikan BPBD hanya pada kegiatan yang sifatnya BPBD yang menyelenggarakan, mengingat pada indikator syarat pembentukan destana/katana ini bahwa desa/kelurahan yang ingin dibentuk menjadi destana/katana harus siap mengalokasikan dana desanya untuk penanggulangan bencana mulai tahap pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana. Terkait prosedur pelaksanaan program destana ini pun harus mengajukan dari pihak desa/kelurahan dengan beberapa indikator yang harus dipenuhi, begitupun dengan kegiatan yang sifatnya bukan BPBD yang menyelenggarakan maka harus mengajukan ke BPBD untuk kegiatan yang ingin diadakan di desa/kelurahan tangguh bencana.

Evaluasi Strategi

Setelah dilakukannya analisis lingkungan, perumusan serta implementasi strategi tersebut maka dibutuhkan suatu evaluasi tahapan yang penting sebagai tindakan korektif selanjutnya begitupun dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi dimana pada saat pencegahan, terjadi bencana serta pasca bencana menjadi hal yang penting untuk dikaji kembali sehingga bencana banjir pada selanjutnya diharapkan tidak terjadi lagi. Bentuk evaluasi yang dilakukan BPBD dengan menyusun rencana kontijensi untuk tahun berikutnya yang di koordinasikan dengan beberapa instansi lintas sektoral, rencana kontijensi menjadi pedoman pada saat tanggap darurat dengan mengevaluasi juga penanganan tanggap darurat pada tahun sebelumnya sehingga menjadi suatu masukan atau solusi untuk perencanaan rencana kontijensi di tahun berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Rabu 16 Juni 2021 Kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bekasi, yang menyatakan :

“Ya pasti kita ada evaluasi, evaluasi itu selain di rencana kontijensi kita evaluasi internal dulu mengulas faktor-faktor penghambat di tahun sebelumnya jadi nanti di penyusunan rencana kontijensi kan kita mengundang SKPD terkait selain dinas tni polri juga pokoknya yang terlibat saat tanggap darurat mereka hadir bersama DPR juga, setiap SKPD yang lain juga saling mengevaluasi misalnya kita melaporkan yang jadi penghambatnya apa kekurangan perahu sekian, atau logistik yang lain sekian gitu nanti dinas terkait juga melaporkan, selain melaporkan kita tentu mengajukan untuk pengadaan logistik dan anggaran yang lebih mumpuni, jadi kurang lebih seperti itu bentuk evaluasi”.

Untuk program destana/katana evaluasi yang dilakukan BPBD baru hanya secara proses saja artinya pada saat keberlangsungan program kegiatan, itu pun hanya bersifat koordinasi saja tidak ada evaluasi secara khusus di akhir program yang berpedoman atau secara struktur seperti mengisi angket, karena memang tidak adanya anggaran khusus yang diberikan BPBD untuk menjalankan program destana/katana masing-masing sehingga tidak adanya laporan pertanggung jawaban dan evaluasi yang secara khusus.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Kamis 17 Juni 2021 Kepada Ketua Relawan Kelurahan Jatimulya, yang menyatakan :

“Kalau untuk evaluasi jujur sama sekali tidak pernah entah dimana terhambatnya, evaluasi ya secara koordinasi langsung saja ketika sedang ada kegiatan, tidak ada evaluasi yang secara pedoman gitu isi-isi angket atau apa tidak ada mungkin juga karena kita tidak ada anggaran khusus kan jadi tidak laporan pertanggung jawaban apa yang sudah dijalankan mungkin makanya tidak ada evaluasi, jadi kita hanya evaluasi secara mandiri saja bersama anggota yang lain”.

Begitupun dengan langkah perbaikan atau tindakan korektif, Pemerintah khususnya BPBD dan dinas terkait maupun Kelurahan/Desa. Usulan dari masyarakat tidak dijadikan sebagai bahan evaluasi dan ditindak lanjuti, sehingga masyarakat secara mandiri melalui forum peduli kali jambe mengambil langkah perbaikan sendiri dengan melakukan aksi gerakan sejuta koin untuk normalisasi kali jambe.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Kamis 17 Juni 2021 Kepada Masyarakat Jatimulya, yang menyatakan :

“Sampai Sekarang tidak ada info-info untuk penanganan lebih lanjut ya, kita sudah mengusahakan memaksimalkan sesuai kapasitas kita audiensi dengan Bupati, Walikota karena kita bersebelahan dengan Kota Bekasi, audiensi dengan kementerian ATR/BPN, sama DPRD Juga dan terakhir kita audiensi sama Pemrov hasilnya mendapatkan bantuan sembako dan pemrov tidak sanggup untuk normalisasi, sejujurnya yang kita harapkan itu solusi kita dijadikan evaluasi masukan mereka untuk berkoordinasi menguatkan lagi sesuai tupoksinya masing-masing. Terkait tidak ada langkah perbaikan kita perwakilan masyarakat melalui forum peduli Kali jambe inisiasi sendiri ya untuk gerakan sejuta koin untuk normalisasi Kali Jambe”.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi masih terdapat kendala dan kelemahan dari analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi serta evaluasi. Mengingat dalam mengatasi banjir bukan hanya dilakukan oleh BPBD saja, tetapi perlunya integrasi dari perangkat daerah lainnya yang mencakup bidang dan tugasnya, masih lemahnya peraturan mengenai kajian resiko bencana menyebabkan tidak menjadi suatu penanganan serius bagi perangkat daerah lainnya. Hal tersebut terlihat dengan belum terealisasinya normalisasi sungai sebagai tahap awal pencegahan, belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki oleh BPBD baik dari segi sarana prasarana, kuantitas dan kualitas SDM maupun anggaran yang tidak mampu mengcover serangkaian kegiatan penanggulangan dari pencegahan sampai pasca bencana, termaksud belum adanya sistem aplikasi mengenai informasi bencana

yang mana berpengaruh terhadap proses kesiapsiagaan masyarakat menghadapi banjir. Sosialisasi kepada masyarakat di desa tangguh bencana belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga sejauh ini masih lemahnya edukasi terhadap masyarakat dengan tidak membiasakan kebiasaan buruk membuang sampah di beberapa titik DAS serta tidak adanya evaluasi yang dilakukan BPBD secara struktur atau berpedoman terhadap program destana/katana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan diatas, maka agar penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik dan optimal. Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkaji kembali kedudukan aturan mengenai kajian resiko bencana agar dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah, mengevaluasi secara berkala kekurangan dari beberapa perangkat daerah yang terlibat dalam menanggulangi banjir.
2. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu merekomendasikan dengan dibuatnya kolam retensi atau (*waterpond*), atau waduk sebagai upaya pencegahan terjadinya banjir dengan dibuatnya penampungan air ketika sungai tidak mampu menampung debit air untuk mengurangi terjadinya luapan air di Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Memberikan penganggaran khusus dalam tahap pencegahan termaksud fasilitas desa tangguh bencana, memperbanyak sarana prasarana untuk pengevakuasian dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang menjadi peran terpenting dalam penyelenggara penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan sosialisasi dengan melalui aplikasi terkait edukasi bencana bagaimana pencegahan yang dilakukan sedini mungkin di masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat peduli lingkungan, dan terdapat simulasi-simulasi dalam menghadapi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Thomas Wheelen, David. Hunger J, (2010). *Manajemen Strategis*. ANDI, Yogyakarta.

Moleong, J. Lexy. 2018, *Metodologi Penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Edisi 2012, *Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. BNPB, Jakarta.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). *Modul Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana*. Jakarta : BNPB

Najichah. (2017). *Banjir, Sebab, Dampak Dan Cara Pencegaham*. Jakarta: Mitra Utama.

David. Fred R. 2011. *Manajemen Strategis*. Jakarta : Salemba Empat

Taufiqurokhman. (2016). *Manajemen Strategi*. Jakarta : Prof. Dr. Moestopo Beragama Universitas Press

Rencana Strategi (Renstra) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022

Jurnal

Nasyiruddin. dkk. (2015). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng*. Vol 5. No.2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi

Perka BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Halaman Web

BPBD Kabupaten Bekasi, 2017, *Sejarah BPBD Kabupaten Bekasi*, dilihat 10 Juli 2021

<<http://bpbd.bekasikab.go.id/sejarah>>

Pikiran Rakyat, 2021, *Dipicu Luapan Air Sungai Sekaligus Efek Proyek Pembangunan, 1.756 Keluarga Terdampak Banjir Di Bekasi*, Depok.com, dilihat 3 Juni 2021 < <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-091464053/dipicu-luapan-air-sungai-sekaligus-efek-proyek-pembangunan-1756-keluarga-terdampak-banjir-di-bekasi>:>

BPBD Kabupaten Bekasi, 2021, *Banjir Melanda 17 Kecamatan Dan 40 Desa Di Kabupaten Bekasi.*, dilihat 10 Juli 2021 < <http://bekasikab.go.id/berita/3461/banjir-melanda-17-kecamatan-dan-40-des-a-di-kabupaten-bekasi>- >

Jabar.news, 2021. *Banjir Di Kabupaten Meluas, Rendam 37 Desa di 17 Kecamatan*. Dilihat 10 Juli 2021 <<https://jabar.inews.id/berita/banjir-di-kabupaten-bekasi-meluas-rendam-37-des-a-di-17-kecamatan>>

Ciptakarya, 2016. *RPIJM Kabupaten Bekasi 2015 – 2019*, Dilihat 10 Juli 2021 < https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_708bf8648e_BAB%20IIBab%202%20Profil%20Kabupaten%20Bekasi%20Fiks.pdf>